

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PROSTITUSI *ONLINE*
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor
341/Pid.Sus/2020/PN.Kis)

ABSTRAK

_Ahmad Bani Sadar *

Tindak pidana prostitusi mengalami perkembangan seiring kemajuan teknologi internet dalam bentuk prostitusi online. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi payung hukum penanggulangan prostitusi online. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana prostitusi *online*, bagaimana kebijakan hukum pidana penegakan hukum terhadap prostitusi *online*, bagaimana analisis hukum putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN.Kis.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Pengaturan tindak pidana prostitusi *online* diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kebijakan hukum pidana penegakan hukum terhadap prostitusi *online* adalah tidak hanya menutup secara paksa namun para pekerja seks, mucikari diberikan pesangon dan lapangan pekerjaan baru, selanjutnya upaya pemerintah Indonesia adalah melakukan penutupan situs-situs porno . Upaya penggarapan kesehatan masyarakat atau lingkungan sosial yang sehat melalui upaya memberikan pendidikan seks yang benar, beraktivitas Positif & mendekatkan diri kepada Tuhan, menjalin hubungan akrab antara orang tua dan anak memantau

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua unsur dari Pasal 27 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum, Penegakan Hukum, Prostitusi .

*Mahasiswa Program Pascasarjana Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

LAW ENFORCEMENT AGAINST ONLINE PROSTITUTION
(Study of the Decision of the Kisaran District Court Number
341/Pid.Sus/2020/PN.Kis)

ABSTRACT

Ahmad Bani Sadar *

The crime of prostitution has developed along with advances in internet technology in the form of online prostitution. The enactment of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions has become the legal umbrella for combating online prostitution. The formulation of the problem in this thesis is how to regulate the crime of online prostitution, what is the policy of criminal law enforcement against online prostitution, how is the legal analysis of the Kisaran District Court decision Number 341/Pid.Sus/2020/PN.Kis. The research method used is descriptive analysis which leads to normative juridical research, namely research conducted by referring to legal norms, namely examining library materials or secondary materials. Secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Arrangements for the crime of online prostitution are regulated in the Criminal Code, Law 39 of 1999 concerning Human Rights, Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons, Law No.44 of 2008 concerning Pornography, Law No. Republic of Indonesia Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 14 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, the criminal law enforcement policy against online prostitution is not only forcibly closed but sex workers, pimps are given severance pay and new jobs, then the government's efforts Indonesia is closing porn sites. Efforts to cultivate public health or a healthy social environment through efforts to provide correct sex education, positive activities & getting closer to God, establishing close relationships between parents and children monitoring The results of the study show that all elements of Article 27 paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law Number 11 of 2008 in conjunction with Article 45 Paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law Number 19 of 2016 concerning amendments to the Republic of Indonesia Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions have been fulfilled, then the Defendant must be declared legally and convincingly proven to have committed a crime as charged in a single indictment.

Keywords: Legal Policy, Law Enforcement, Prostitution

* Student of the Postgraduate Program in the Law Science Program of the Islamic University of North Sumatra.